

ANALISIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA PTKI UIN IMAM BONJOL PADANG

**Nola Ariesta Elvan¹, Yusnil Khoiriah Siregar², Muhammad zalnur ³,
Muhammad Kosim⁴**

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email kontributor: ¹2420010026@uinib.ac.id, ²2420010010@uinib.ac.id,

³mad_zalnur@gmail.co.id, ⁴muhkosimpadang@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBKM di UIN Imam Bonjol Padang masih terbatas pada tataran administratif. Program pertukaran mahasiswa ke luar negeri belum terlaksana, program magang lintas jurusan belum terstruktur, dan terdapat sejumlah hambatan seperti perbedaan regulasi antar institusi, tidak sinkronnya penawaran mata kuliah, rendahnya minat mahasiswa, serta minimnya informasi dan sosialisasi. Meski terdapat kerangka kebijakan dan dokumen kerja sama antar PTKIN, pelaksanaannya masih belum maksimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sosialisasi, harmonisasi regulasi, serta pelibatan aktif seluruh sivitas akademika untuk mendukung keberhasilan program MBKM di lingkungan PTKIN.

Kata kunci: Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Implementasi, UIN Imam Bonjol

Abstract

This study aims to analyse the implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) policy at Imam Bonjol State Islamic University (UIN) Padang as part of the State Islamic Religious Universities (PTKIN). This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The results showed that the implementation of MBKM at UIN Imam Bonjol Padang is still limited to the

administrative level. Student exchange programmes abroad have not been implemented, internship programmes across departments have not been structured, and there are a number of obstacles such as differences in regulations between institutions, unsynchronised course offerings, low student interest, and lack of information and socialisation. Although there is a policy framework and cooperation documents between PTKIN, the implementation is still not optimal. This study recommends the need to strengthen socialisation, harmonise regulations, and actively involve the entire academic community to support the success of the MBKM program at PTKIN.

Keywords: Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Implementation, UIN Imam Bonjol

PENDAHULUAN

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah salah satu kebijakan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 (Sopiansyah et al., 2022). Kebijakan tersebut tentu mengubah kurikulum pendidikan yang telah lama dijalankan selama bertahun-tahun. Kebijakan ini timbul agar lembaga pendidikan mampu menyikapi tantangan perubahan zaman, dan program ini sebagai respons terhadap kebutuhan zaman tersebut. MBKM merupakan sebuah terobosan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri melalui kegiatan pembelajaran yang fleksibel di luar program studi, bahkan di luar kampus. Kebijakan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menciptakan lulusan yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 serta dinamika global yang terus berkembang (Mutaqin, 2024; Rati et al., 2024).

Mahasiswa disiapkan menjadi sarjana yang tangguh, siap menjadi pemimpin dan relevan dengan kebutuhan zaman serta mahasiswa tidak hanya menjadi sarjana yang identik. Bentuk implementasinya adalah seperti pertukaran pelajar, magang, proyek kemanusiaan, riset, kewirausahaan dan kegiatan lain untuk mendorong kolaborasi lintas disiplin dan penguatan *soft skills* (Ainullah et al., 2025). Melalui program ini mahasiswa diarahkan dan berkesempatan mengembangkan minat, bakat dan keterampilannya yang sudah diatur dalam peraturan menteri. Mahasiswa dapat memilih belajar diluar program studinya selama 3 semester, sehingga pembelajarannya lebih otonom dan fleksibel. Mahasiswa tidak hanya unggul dalam akademis, namun juga unggul dalam keterampilan lain yang diperlukan pasar (Kusumaningrum et al., n.d.; Triani, 2023).

Dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), termasuk Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, implementasi MBKM memiliki

dimensi yang khas. PTKI tidak hanya berkewajiban melahirkan lulusan yang unggul secara akademik dan profesional, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai keislaman yang kuat. Oleh karena itu, adaptasi kebijakan MBKM di lingkungan PTKI memerlukan pendekatan yang kontekstual dan sensitif terhadap misi keilmuan dan keagamaan yang diemban (Siswanto & Hadi, 2024).

Namun, penerapan MBKM di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang masih menghadapi berbagai tantangan. Diantaranya adalah keterbatasan infrastruktur pendukung, belum optimalnya kerjasama dengan mitra eksternal, dan kurangnya pemahaman sivitas akademika terhadap konsep dan teknis pelaksanaan MBKM. Selain itu belum semua program studi mampu merancang kurikulum yang integratif dan adaptif terhadap delapan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang diamanatkan oleh pemerintah (Putri, n.d.).

Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, yang jika tidak segera diatasi dapat menghambat pencapaian tujuan strategis MBKM. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai implementasi kebijakan ini pada lingkup PTKI, khususnya di UIN Imam Bonjol Padang. Analisis ini penting tidak hanya untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan MBKM, tetapi juga untuk merumuskan strategi penguatan pelaksanaan yang sesuai dengan karakteristik institusi keagamaan. Beberapa penelitian sebelumnya juga menyoroti pelaksanaan MBKM di PTKIN seperti penelitian yang dilakukan oleh Fajri et al., (2024) yang mendapati bahwa pelaksanaan MBKM di PTKIN belum optimal dikarenakan banyaknya keterbatasan dan tantangan yang kompleks sehingga impementasinya belum maksimal.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan MBKM telah diimplementasikan di UIN Imam Bonjol Padang, tantangan yang dihadapi, serta peluang-peluang yang dapat dioptimalkan guna mendukung transformasi pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas, relevan, dan berdaya saing global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi kebijakan *Merdeka Belajar Kampus Merdeka* (MBKM) di UIN Imam Bonjol Padang. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap dinamika sosial, persepsi, serta praktik kelembagaan yang kompleks, sebagaimana terjadi dalam proses pelaksanaan kebijakan pendidikan tinggi (Handoko et al., 2024).

Lokasi penelitian ditetapkan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan fokus pada unit-unit pelaksana kebijakan MBKM, seperti Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M), program studi, serta

bagian akademik. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari pejabat struktural (ketua prodi) yang terlibat langsung dalam kegiatan MBKM.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara mendalam terhadap informan kunci yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pelaksanaan MBKM,
2. Observasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang relevan dengan program MBKM di lingkungan kampus, dan
3. Studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen kebijakan, pedoman pelaksanaan MBKM, laporan kegiatan, serta kurikulum yang telah disesuaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali implementasi program pertukaran mahasiswa dan magang lintas jurusan di salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dalam konteks kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Ketua jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Imam Bonjol Padang menunjukkan bahwa terdapat beberapa temuan penting yang dapat dikategorikan ke dalam tema-tema berikut:

1. Ketidakhadiran Program Pertukaran Mahasiswa Keluar Negeri

Salah satu temuan penting adalah belum adanya program pertukaran mahasiswa dari UIN Imam Bonjol ke luar negeri. Saat ditanya terkait program pertukaran, narasumber menjelaskan:

“Pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa tidak ada. Tapi ada orang dari Vietnam yang belajar di UIN Imam Bonjol ini (Wawancara, June 13, 2025)”

Pernyataan narasumber yang menyebutkan bahwa UIN Imam Bonjol belum memiliki program pertukaran mahasiswa ke luar negeri, meskipun sudah menerima mahasiswa asing dari Vietnam, menunjukkan bahwa program mobilitas internasional di kampus tersebut masih sangat terbatas dan bersifat satu arah (*inbound*) saja. Hal ini berarti mahasiswa lokal belum memiliki kesempatan untuk mengikuti program pertukaran formal ke luar negeri yang bersifat timbal balik (*reciprocal exchange*).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa internasionalisasi pendidikan tinggi di UIN Imam Bonjol masih dalam tahap awal. Padahal, menurut Agung & Santosa (2017) internasionalisasi yang ideal dalam pendidikan tinggi mencakup pertukaran mahasiswa yang bersifat dua arah, baik dalam pengiriman maupun penerimaan. Ketimpangan ini juga bertolak belakang dengan semangat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang mendorong mobilitas mahasiswa antar perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri, untuk memperluas wawasan global dan meningkatkan kompetensi lintas budaya (Luturmas et al., 2022).

Berdasarkan sumber dari jurnal dan literatur terkait program pertukaran mahasiswa dalam konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menyatakan bahwa Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) merupakan salah satu program MBKM yang bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan pengakuan maksimal 20 SKS. Program ini mendorong mobilitas mahasiswa agar mendapatkan pengalaman kebhinekaan, memperluas wawasan, menambah relasi, dan meningkatkan toleransi serta kualitas pendidikan (Anwar,2022).

Ketidaadaan program outbound atau pengiriman mahasiswa ke luar negeri dalam skema pertukaran mahasiswa di beberapa perguruan tinggi, termasuk UIN Imam Bonjol, dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait. Berdasarkan kajian dari berbagai jurnal, faktor-faktor tersebut meliputi, Keterbatasan kerja sama internasional: Banyak perguruan tinggi masih menghadapi kendala dalam menjalin dan mengelola kerja sama internasional yang berkelanjutan dan formal. Hal ini berdampak pada minimnya skema pertukaran mahasiswa yang memungkinkan mahasiswa lokal untuk belajar di luar negeri secara resmi. Kerja sama internasional yang belum kuat atau belum terstruktur dengan baik membatasi peluang outbound bagi mahasiswa (Febriani et al., 2023).

Rendahnya literasi internasionalisasi di kalangan pengelola program: Pengelola program pertukaran mahasiswa seringkali kurang memiliki pemahaman mendalam tentang proses internasionalisasi pendidikan tinggi, termasuk tata kelola administrasi, prosedur akademik, dan budaya akademik internasional. Hal ini menyebabkan kurangnya inisiatif dan kesiapan institusi dalam mengembangkan program outbound yang efektif dan berkelanjutan (indriana, 2021).

Minimnya dukungan administratif dan finansial, Hambatan administratif seperti proses pengurusan dokumen, surat tugas, dan pengakuan kredit seringkali menjadi penghambat utama. Selain itu, keterbatasan dana baik dari institusi maupun mahasiswa sendiri menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Biaya hidup yang lebih tinggi di negara tujuan dan kurangnya bantuan dana membuat mahasiswa sulit mengikuti program outbound, Tantangan adaptasi budaya dan bahasa: Mahasiswa menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan akademik dan sosial yang berbeda, termasuk perbedaan bahasa dan budaya. Hal ini menambah beban psikologis dan menjadi salah satu alasan institusi enggan mengirim mahasiswa ke luar negeri tanpa persiapan yang memadai (Anggraini et al., 2022).

Keterbatasan sistem informasi akademik dan manajemen program: Sistem akademik yang belum terintegrasi dengan baik antar perguruan tinggi mitra, perbedaan kurikulum, dan kesulitan dalam penyetaraan SKS menjadi kendala teknis yang menghambat pelaksanaan pertukaran mahasiswa secara lancar (Fitriana et al., 2022).

Dengan demikian, untuk mengatasi ketiadaan program outbound, perguruan tinggi perlu melakukan penguatan kerja sama internasional yang strategis dan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas pengelola program melalui pelatihan literasi internasional, serta menyediakan dukungan administratif dan finansial yang memadai. Selain itu, pengembangan sistem informasi akademik yang terintegrasi dan persiapan adaptasi budaya bagi mahasiswa juga menjadi kunci keberhasilan program pertukaran mahasiswa yang timbal balik dan berkelanjutan sesuai dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

2. Program Magang Lintas Jurusan, Kebijakan Ada, Implementasi Terbatas

Institusi menyatakan telah membuka kemungkinan bagi mahasiswa untuk melakukan magang di luar jurusan. Namun, realisasi di lapangan masih belum merata. Narasumber menyebutkan:

“Kalau ada yang mau magang di luar jurusan boleh, Tapi implementasinya masih terbatas.” (Wawancara, June 13, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan magang lintas jurusan atau lintas daerah masih bersifat insidental, belum terstruktur dalam program yang berkelanjutan dan dikelola secara sistematis oleh institusi.

Pernyataan narasumber yang menyebutkan bahwa institusi sudah membuka kemungkinan bagi mahasiswa untuk melakukan magang di luar jurusan, namun realisasinya masih terbatas dan belum merata, mengindikasikan adanya gap antara kebijakan formal dan implementasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara konsep program magang lintas jurusan dan lintas daerah telah diizinkan, pelaksanaannya masih bersifat insidental dan belum terstruktur secara sistematis.

Keterbatasan Sistem dan Manajemen Program Magang, Menurut beberapa studi, keberhasilan program magang lintas jurusan dan lintas daerah sangat bergantung pada sistem manajemen yang terintegrasi dan dukungan institusional yang kuat (Putri, D. A., & Hidayat, R., 2022). Tanpa adanya mekanisme yang jelas, seperti panduan, monitoring, dan evaluasi yang terstruktur, program magang cenderung hanya berjalan secara sporadis dan tergantung inisiatif individu mahasiswa atau dosen pembimbing.

Peran Kebijakan Institusi dalam Mendukung Mobilitas Magang, Kebijakan yang mendukung fleksibilitas magang lintas jurusan dan lintas daerah harus diikuti dengan penguatan kapasitas administrasi dan jaringan kerja sama dengan

berbagai mitra industri atau lembaga di berbagai wilayah (Sari, M. R., & Nugroho, A., 2023). Jika jaringan kerja sama masih terbatas atau tidak terorganisir dengan baik, maka peluang mahasiswa untuk melakukan magang di luar jurusan atau daerah akan sangat terbatas.

Manfaat dan Tantangan Magang Lintas Jurusan dan Daerah, Magang lintas jurusan dan daerah memberikan nilai tambah bagi mahasiswa, seperti pengembangan soft skills, wawasan multidisipliner, dan pengalaman adaptasi budaya kerja yang beragam (Hanif & Rahmawati, 2021). Namun, tantangan yang sering muncul adalah kesulitan dalam penyesuaian kurikulum, pengakuan kredit, serta kesiapan mahasiswa menghadapi lingkungan kerja yang berbeda.

Pelaksanaan magang lintas jurusan dan lintas daerah di perguruan tinggi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dengan manajemen program yang belum terstruktur dan jaringan kerja sama yang belum optimal. Oleh karena itu, institusi perlu mengembangkan kebijakan dan sistem pendukung yang lebih komprehensif agar program magang ini dapat berjalan secara merata, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa. Penguatan koordinasi antar unit akademik dan peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak di luar kampus menjadi kunci keberhasilan program ini.

3. Hambatan Implementasi Program MBKM

Meskipun program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kebebasan belajar bagi mahasiswa lintas program studi dan lintas perguruan tinggi, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan empat hambatan utama yang menghambat optimalisasi pelaksanaan MBKM di institusi ini.

a. Perbedaan Regulasi Antar Institusi

Salah satu hambatan signifikan adalah adanya perbedaan regulasi antara perguruan tinggi, termasuk di antara sesama PTKIN. Narasumber menyampaikan:

"Regulasi antara lembaga itu berbeda" (Wawancara, June 13, 2025)

Perbedaan regulasi antar perguruan tinggi, termasuk di antara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan MBKM. Hal ini mencakup ketidaksamaan dalam kurikulum, sistem akademik, mekanisme pengakuan SKS, hingga kalender akademik yang tidak seragam. Menurut Nurhadi (2021) dalam jurnal *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, perbedaan regulasi ini menyebabkan sulitnya konversi kredit dan pengakuan hasil belajar lintas institusi, yang pada akhirnya menghambat mobilitas mahasiswa.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan oleh Edwards (1980) ketidakterpaduan regulasi ini masuk dalam aspek *bureaucratic structure* yang dapat menghambat proses eksekusi kebijakan karena adanya konflik aturan dan prosedur yang tidak sinkron antar lembaga.

b. Tidak Sinkronnya Penawaran Mata Kuliah

Narasumber mengungkapkan bahwa sering kali mata kuliah yang ditawarkan tidak sama di setiap semester antar institusi:

"Mata kuliah yang ditawarkan juga terkadang tidak sama di setiap semester"(Wawancara, June 13, 2025).

Ketidaksamaan penawaran mata kuliah antar semester dan antar institusi juga menjadi kendala utama. Hal ini menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam menyusun rencana studi lintas kampus karena mata kuliah yang diinginkan tidak tersedia secara bersamaan. Lemahnya koordinasi antar institusi dan kurangnya sistem informasi terintegrasi menyebabkan ketidaksesuaian penawaran mata kuliah, sehingga menghambat kelancaran program pertukaran mahasiswa (Rahmadia et al., 2022).

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengembangan platform digital nasional MBKM yang interaktif dan real-time agar penawaran mata kuliah dapat diakses secara transparan dan terintegrasi antar perguruan tinggi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

c. Kurangnya Minat Mahasiswa

Aspek lain yang menjadi hambatan adalah rendahnya minat mahasiswa untuk mengikuti program MBKM:

"Minat mahasiswa itu untuk MBKM itu juga tidak terlalu tinggi, kan?"(Wawancara, June 13, 2025).

Rendahnya minat mahasiswa mengikuti program MBKM juga menjadi hambatan yang tidak bisa diabaikan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman manfaat program, ketakutan meninggalkan zona nyaman, serta keraguan terhadap mekanisme konversi nilai dan beban administratif menjadi penyebab utama (Putra, 2023).

Dalam konteks teori perilaku (behavioral approach) pada implementasi kebijakan, aktor pelaksana dan sasaran kebijakan – dalam hal ini mahasiswa – memiliki peran penting. Menurut Rogers, (2003), keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada tingkat adopsi dan motivasi aktor sasaran. Oleh karena itu, pendekatan motivasional dan informasional yang efektif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa

d. Minimnya Informasi dan Sosialisasi

Pihak institusi juga mengakui bahwa informasi dan sosialisasi mengenai program MBKM masih sangat terbatas:

"Kurang informasi"

"Sosialisasinya masih kurang"(Wawancara, June 13, 2025)

Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan mahasiswa dan dosen terkait prosedur, manfaat, serta mekanisme program MBKM. sosialisasi yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan dosen mengenai prosedur, manfaat, dan mekanisme MBKM. Kurangnya sosialisasi menyebabkan rendahnya partisipasi dan pemanfaatan program secara optimal (Rahayu, S., & Prasetyo, A., 2023). Hal ini menjadi tantangan serius karena kebijakan sebesar MBKM membutuhkan dukungan dari seluruh lini, baik dari mahasiswa, dosen, hingga tenaga kependidikan. Dalam banyak kasus, informasi hanya berhenti di tingkat pusat (rektorat atau LPM), tanpa dilanjutkan dalam bentuk pelatihan, workshop, atau penyuluhan ke tingkat prodi dan fakultas.

Padahal, menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, program MBKM memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar prodi selama tiga semester. Tanpa informasi yang memadai, hak ini menjadi tidak efektif karena mahasiswa tidak memahami cara memanfaatkannya.

4. Kebijakan Sudah Ada, Pelaksanaan Belum Maksimal

Narasumber mengonfirmasi bahwa secara administratif, institusi telah memiliki kerja sama antar PTKIN untuk mendukung pelaksanaan MBKM:

"Sudah ada kebijakannya. Sudah ada. Ada 32 PTKIN Indonesia yang bekerja sama dengan kita masing-masing."

Namun, implementasinya belum optimal dan masih terbatas pada dokumen administratif:

"implementasinya belum"(Wawancara, June 13, 2025)

Meskipun secara administratif institusi telah memiliki kerja sama dengan sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), implementasi kerja sama tersebut masih belum optimal dan terbatas pada aspek dokumen administratif. Hal ini tercermin dari pernyataan narasumber yang menyebutkan bahwa sudah ada kebijakan dan kerja sama dengan 32 PTKIN di Indonesia, tetapi pelaksanaannya belum menyentuh aspek teknis di tingkat fakultas atau program studi secara luas.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan implementasi di lapangan, khususnya dalam hal koordinasi dan pelaksanaan program MBKM yang bersifat lintas institusi. Menurut laporan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag, meskipun telah dilakukan sinergi dan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara PTKIN dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk program MBKM berbasis riset, keberhasilan implementasi program ini sangat bergantung pada

kesiapan teknis di tingkat fakultas dan prodi, termasuk sosialisasi, pengelolaan akademik, dan monitoring pelaksanaan (Kemenag, n.d.).

Selain itu, rapat koordinasi di tingkat lembaga penjaminan mutu (LPM) dan pusat pengembangan kurikulum menunjukkan bahwa perumusan kebijakan teknis yang mengatur penilaian, sistem informasi akademik, dan penugasan dosen masih dalam proses penyempurnaan agar implementasi MBKM dapat berjalan lancar dan menyentuh seluruh jenjang akademik, bukan hanya di tingkat pusat (*LPM Rapat Koordinasi Bahas Perumusan Dan Pelaksanaan MBKM Semester Gasal 2024/2025, 2024*).

Hal serupa juga ditemukan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia, di mana pelaksanaan MBKM masih terkendala oleh kesiapan infrastruktur dan anggaran, sehingga pelaksanaan program baru terbatas pada beberapa bentuk MBKM seperti pertukaran pelajar dan belum merata ke seluruh fakultas dan program studi (*BABAK BARU PRAKTIK MBKM DI LINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PTKIN SE-INDONESIA | Fakultas Syariah | Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, n.d.*)

Dari sisi solusi, penting untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar tingkat pusat, fakultas, dan program studi agar kebijakan kerja sama yang sudah ada dapat diimplementasikan secara teknis dan menyeluruh. Forum-forum seperti Focus Group Discussion (FGD) antar fakultas PTKIN juga menjadi wadah efektif untuk memperkuat kolaborasi dan menyelaraskan pelaksanaan MBKM di tingkat unit akademik (*Syariah Dan Hukum | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, n.d.*)

5. Harapan Penguanan Program di Masa Depan

Narasumber juga menyampaikan harapan agar program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ke depan dapat dioptimalkan melalui perbaikan yang menyeluruh pada aspek sosialisasi dan penjadwalan akademik, dengan memperhatikan secara cermat waktu pelaksanaan yang tepat, penyediaan informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh seluruh civitas akademika, serta upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan minat dan partisipasi aktif mahasiswa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi program MBKM di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terstruktur, sehingga memberikan manfaat yang optimal tidak hanya bagi mahasiswa sebagai penerima manfaat utama, tetapi juga bagi dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung terciptanya proses pembelajaran yang inovatif, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di UIN Imam Bonjol Padang masih berada pada tahap awal dan belum berjalan secara optimal. Meskipun kebijakan dan kerja sama antar PTKIN telah disusun, pelaksanaan program seperti pertukaran mahasiswa dan magang lintas jurusan belum terstruktur dengan baik. Peluang pembelajaran di luar kampus memang terbuka, namun belum didukung oleh sistem akademik yang memadai dan belum menyentuh seluruh fakultas atau program studi secara merata. Beberapa kendala utama dalam pelaksanaan MBKM di antaranya adalah perbedaan regulasi antar institusi, tidak sinkronnya penawaran mata kuliah, rendahnya minat mahasiswa, serta kurangnya informasi dan sosialisasi terkait program. Hambatan-hambatan ini menyebabkan program MBKM belum mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa dan dosen.

Di sisi lain, terdapat kesadaran dari pihak pengelola bahwa MBKM merupakan kebijakan yang strategis dan penting untuk mendorong transformasi pendidikan tinggi. Harapan ke depan adalah adanya perbaikan dalam aspek perencanaan, penyelarasan kurikulum, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta penguatan sosialisasi agar program MBKM benar-benar dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan awalnya dan memberi manfaat nyata bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan PTKIN, khususnya UIN Imam Bonjol Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I., & Santosa, A. (2017). Dinamika LPTK menuju perguruan tinggi kelas dunia (World Class University/WCU). *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 31(1), 43–54.
- Ainullah, M., Yuspiani, Y., & Musdalifah, M. (2025). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM). *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 14(9), 81–90.
- Anggraini, S., Palupi, A., Hadi, K., & Arsyad, A. T. (2022). Analisis dampak program pertukaran pelajar merdeka belajar kampus merdeka terhadap mahasiswa internal. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial E-ISSN*, 2745, 5920.
- Anwar, R. N. (2022). Motivasi Mahasiswa Untuk Mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5393>
- BABAK BARU PRAKTIK MBKM DI LINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PTKIN SE-INDONESIA | *Fakultas Syariah | Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. (n.d.). Retrieved July 3, 2025
- Edwards, G. C. (1980). Implementing public policy. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282272062689920>

- Fajri, N. C., Mintarsih, W., Hidayanti, E., & Juaniati, R. (2024). Keterbatasan dalam Kebebasan: Evaluasi Implementasi Kurikulum MBKM PTKIN. *Journal of Instructional and Development Researches*, 4(4), 192–203.
- Febriani, A. F., Ikbal, M., & Erfina, E. (2023). Pengembangan Skill Mahasiswa Melalui Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 7(1), 1–10.
- Fitriana, R., Safitri, D. M., Yojana, R. M., Witonohadi, A., Sari, L., Aji, D., & Ningsih, Y. (2022). Analisis Keberhasilan Program Pertukaran Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. *JURNAL TEKNIK INDUSTRI*, 12(1), 21–29.
- Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hanif, A. F., & Rahmawati, R. (2021). Pengaruh latar belakang pendidikan, tingkat religiusitas dan kesesuaian jurusan terhadap kinerja karyawan pada Bank Muamalat Indonesia cabang Bekasi. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 12(1), 39–48.
- indriana. (2021). *Implementasi Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka*.
- Kemenag. (n.d.). *Diktis Kemenag dan BRIN Sinergi Program MBKM Berbasis Riset*. <https://kemenag.go.id>. Retrieved July 3, 2025.
- Kusumaningrum, H., Kom, S., & Munawwaroh, Z. (n.d.). *Role Model Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Indonesia*. Penerbit Affinity. Retrieved July 1, 2025, from
- LPM Rapat Koordinasi Bahas Perumusan dan Pelaksanaan MBKM Semester Gasal 2024/2025. (2024, July 17). IAIN PAREPARE.
- Struktur Kurikulum Berdasarkan Kemendikbudristek No 371/M/2021 Dan Pp No 57 Tahun 2021 Pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Rpp) Tahun Ajaran 2022/2023 Di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Multidisipliner BHARASA*, 1(2), 71–81.
- Mutaqin, A. Z. (2024). Relevansi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dengan Era Society 5.0. *HASBUNA: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 357–368.
- Nurhadi. (2021). Hambatan Implementasi Program Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6 (2), 123–135.
- Putra. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Mahasiswa dalam Program MBKM. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9(1), 45–58.
- Putri, D. A., & Hidayat, R. (2022). Manajemen Program Magang di Perguruan Tinggi: Studi Kasus pada Magang Lintas Jurusan. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*. *Jurnal Pendidikan Dan Manajemen*, 145–158.

- Putri, S. (n.d.). *Dinamika MSIB sebagai Kebijakan Intervensi Kesiapan Kerja Mahasiswa dalam Era Kampus Merdeka dan Transformasinya menuju Magang Berdampak*. Retrieved July 1, 2025.
- Rahayu, S., & Prasetyo, A. (2023). Peran Sosialisasi dalam Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan*, Vol. 8, No. 2, 150–162.
- Rahmadia, C. I., Rahma, A. A., & Haq, M. Y. S. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Analisa Problematika. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 7(2), Article 2.
- Rati, N. W., PARAMARTHA, W. E., WIDIASTINI, N. W. E., & AGUSTIKA, G. N. S. (2024). *Mengasah Soft Skills dan Hard Skills Melalui Program MBKM: Strategi dan Implementasi*.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations*, 5th edn London. UK: Free Press.[Google Scholar].
- Sari, M. R., & Nugroho, A. (2023). Pengembangan Jaringan Kerja Sama Industri untuk Mendukung Program Magang Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Pendidikan*, 10 (1), 67–79.
- Siswanto, S., & Hadi, M. P. (2024). *PARADIGMA BARU PENDIDIKAN ISLAM: Reformulasi Paradigma Keilmuan dan Pembelajaran di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA.
- Sopiansyah, D., Masruroh, S., Zaqiah, Q. Y., & Erihadiana, M. (2022). Konsep dan implementasi kurikulum MBKM (merdeka belajar kampus merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34–41.
- Syariah dan Hukum | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.* (n.d.). Retrieved July 3, 2025.
- Triani, H. (2023). *ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN PROGRAM MBKM (MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA) DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO* [PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo].
- Wawancara. (2025, June 13). [Personal communication].